

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Namun, pengelolaan sampah yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau dikenal juga dengan istilah paradigma lama pengelolaan sampah masih sering ditemui di Indonesia. Penerapan paradigma lama pengelolaan sampah mengakibatkan timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah. Selain itu, timbunan sampah juga berpotensi melepaskan gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Jadi penerapan paradigma lama pengelolaan sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sedangkan penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah terdiri dari lima aktivitas utama meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perencanaan pengelolaan sampah untuk kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).

Kabupaten Padang Pariaman termasuk kota sedang dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 406.076 jiwa. Kabupaten Padang Pariaman tidak luput dari

permasalahan persampahan. Kabupaten Padang Pariaman memiliki letak yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dan dilewati jalur lintas Sumatera. Hal ini membuat permasalahan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman menjadi sorotan. Saat ini pemangku kepentingan sektor persampahan di Kabupaten Padang Pariaman dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman bidang pengolahan sampah (DLH). Jumlah timbulan sampah Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 3,087 liter/orang/hari.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memprioritaskan pengelolaan persampahan. Hal ini terlihat dari sangat terbatasnya pelayanan/terangkutnya sampah-sampah domestik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu TPA Padang Olo dan TPA Ladang Laweh. Timbulan sampah yang terangkut ke TPA sebesar 1,35% dari jumlah timbulan sampah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memadai. Pemerintah daerah belum menyediakan wadah komunal, tidak sampai setengah dari kecamatan yang ada di kabupaten memiliki sarana pengumpulan, sarana pengumpulan hanya mampu mengumpulkan sepertiga sampah pasar di beberapa kecamatan, kondisi Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) tidak layak, sarana pengangkutan hanya mampu mengangkut seperempat sampah pasar ke TPA, tidak ada pengolahan sampah di TPA dan TPA masih menggunakan sistem *open dumping*. Belum adanya dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman ini juga membuat kondisi persampahan tidak terkoordinir dengan baik (Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2016).

Untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ideal di Kabupaten Padang Pariaman maka diperlukan suatu perencanaan umum atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2008, pengelolaan sampah Kabupaten Padang Pariaman perlu menyusun PTMP dengan konsep 3R dan periode perencanaan minimal 10 (sepuluh) tahun, yang memuat aspek teknis

operasional yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPA dengan aspek non teknis berupa aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan/legalitas dan aspek peran serta masyarakat. Diharapkan dengan adanya PTMP dengan konsep 3R dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah di Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk membuat perencanaan teknis dan manajemen persampahan Kabupaten Padang Pariaman.

1.2.2 Tujuan

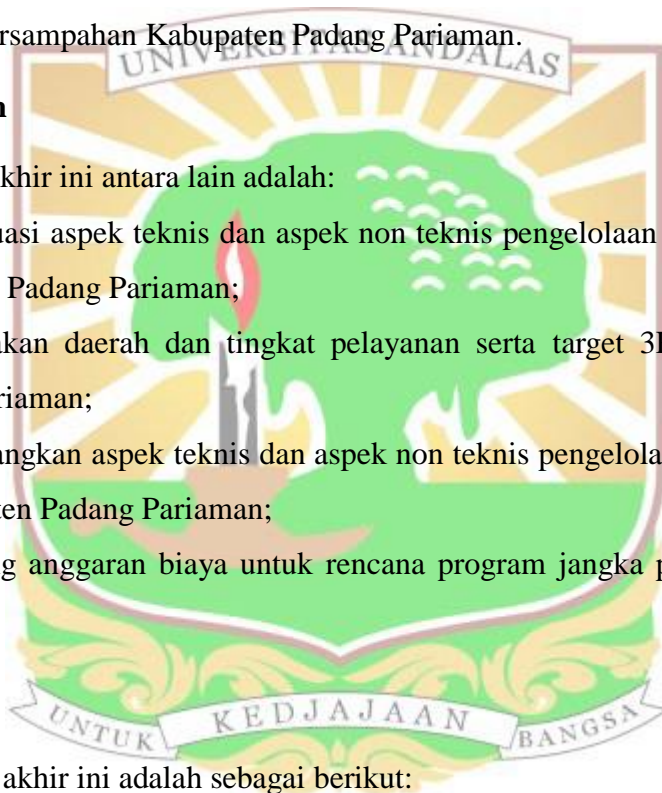
Tujuan tugas akhir ini antara lain adalah:

1. Mengevaluasi aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Merencanakan daerah dan tingkat pelayanan serta target 3R di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Mengembangkan aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menghitung anggaran biaya untuk rencana program jangka pendek (5 tahun pertama).

1.3 Manfaat

Manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya DLH sebagai pengelola persampahan dalam mengambil dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mengatasi masalah untuk masa-masa mendatang;
3. Memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam meningkatkan



partisipasinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah:

1. Evaluasi terhadap aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan sampah Kabupaten Padang Pariaman dengan UU No. 18 tahun 2008, Permen PU No. 03/PRT/M/2013, SNI 19-2454-2002, SNI 3242:2008, PP No. 81 tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
2. Perencanaan pengembangan pengelolaan persampahan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman;
3. Perencanaan lokasi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman dengan membuat zona-zona berdasarkan kepadatan dan penyebaran penduduk, sarana dan prasarana pengelolaan sampah eksisting dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman;
4. Perencanaan pengembangan daerah dan tingkat pelayanan serta target 3R yang mengacu pada RTRW Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 14 tahun (2017-2030) yang dibagi menjadi 3 rencana program sesuai dengan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 yaitu jangka pendek (2017-2021), jangka menengah (2022-2026) dan jangka panjang (2027-2030);
5. Perencanaan pengembangan aspek teknis pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Perencanaan jumlah pewadahan yang dibutuhkan berdasarkan pola pewadahan yang direncanakan di setiap zona;
 - b. Menentukan perletakan wadah sampah berdasarkan zona-zona pengembangan dalam rencana program jangka pendek;
 - c. Menentukan pola pengumpulan sampah di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan zona-zona pengembangan;
 - d. Perencanaan pengolahan sampah berupa TPS 3R dan/ atau TPST di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan zona-zona pengembangan;
 - e. Menentukan rute pengangkutan sampah yang paling efektif berdasarkan jarak dan waktu tempuh dalam rencana program jangka pendek;

- f. Perencanaan pengelolaan dengan konsep 3R di masing-masing zona pelayanan dengan skala kawasan; dan
 - g. Perhitungan kebutuhan luas TPA.
6. Perencanaan pengembangan aspek non teknis pengelolaan sampah meliputi peningkatan aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
7. Perencanaan anggaran biaya untuk program jangka pendek (2017-2021).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori literatur mengenai perencanaan teknis pengelolaan persampahan.

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Berisi tentang kondisi fisik dan kondisi non fisik wilayah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV : KONDISI EKSISTING SISTEM PERSAMPAHAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berisi tentang kondisi pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman meliputi timbulan, komposisi, berat jenis sampah, tingkat dan daerah pelayanan, aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan sampah.

BAB V : METODOLOGI PERENCANAAN

Berisi tahapan perencanaan yang dilakukan terkait perencanaan teknis dan manajemen persampahan.

BAB VI : IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERSAMPAHAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

Berisi tentang uraian mengenai permasalahan pengelolaan persampahan dan upaya yang perlu dikembangkan pada sistem pengelolaan.

BAB VII : RANCANGAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berisi tentang skenario menyeluruh sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Padang Pariaman untuk rencana program jangka panjang.

BAB VIII : RENCANA TINDAK LANJUT

Berisi tentang rencana detail kegiatan pengelolaan persampahan Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan konsep 3R untuk rencana program jangka pendek.

BAB IX : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari perencanaan yang telah diuraikan.

